

**WEWENANG WALI NAGARI DALAM MENGKOORDINASIKAN
PEMBANGUNAN SECARA PARTISIPATIF DI NAGARI SAGO SALIDO
KECAMATAN IV JURAI KABUPATEN PESISIR SELATAN**

EXECUTIVE SUMMARY

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



OLEH:

Muhammad Cevin Iralloza Zikra

1810012111345

BAGIAN HUKUM TATA NEGARA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA

PADANG

2025

Reg No: 35/Skripsi/HTN/FH/III-2025

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY

Reg. No: 35/Skripsi/HTN/III-2025

Nama : **Muhammad Cevin Iralloza Zikra**
Nomor : **1810012111345**
Bagian : **Hukum Tata Negara**
Judul Skripsi : **Wewenang Wali Nagari Dalam Mengkoordinasikan
Pembangunan Secara Partisipatif Di Nagari Sago Salido
Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan**

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh pembimbing untuk di upload ke website

Dr. Sanidjar Pebrihariati. R, S.H., M. H. (Pembimbing)



**WEWENANG WALI NAGARI DALAM MENGKOORDINASIKAN
PEMBANGUNAN SECARA PARTISIPATIF DI NAGARI SAGO SALIDO
KECAMATAN IV JURAI KABUPATEN PESISIR SELATAN**

Muhammad Cevin Iralloza Zikra¹, Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H.,M.H.¹

¹Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta²

Email: zikramhmd@gmail.com

ABSTRAK

Based on Pesisir Selatan District Regional Regulation Number 2 of 2016 concerning Nagari, village authority includes authority in the field of implementing village development, village community development, and village community empowerment based on community initiatives, original rights, and village customs. Problem formulation 1) What are the duties and authorities of the Village Head in coordinating participatory development in Sago Salido Village, IV Jurai District, Pesisir Selatan Regency? 2) What are the obstacles faced by the Village Head in coordinating participatory development in Sago Salido Village, IV Jurai District? 3) Efforts of the Village Head in coordinating participatory development in Nagari Sago Salido, IV Jurai District, Pesisir Selatan Regency? The research method used is sociological legal research. The data sources used are primary data and secondary data, data sources are obtained through document studies and interviews and then analyzed using qualitative analysis. Research results: 1) Duties and Authorities of Village Heads in participatory development supervision in Nagari Sago Salido, IV Jurai District, Pesisir Selatan Regency. 2) The obstacles faced by Village Heads in participatory development supervision in Nagari Sago Salido, IV Jurai District, namely: a. Transfer of Budget Function from Infrastructure to Agriculture and Marine Affairs. b) Priority Use of Village Funds for Community Empowerment. 3). Village Heads' efforts in coordinating participatory development in Nagari Sago Salido, IV Jurai District, Pesisir Selatan Regency, namely: a) Efficient Budget Management. b) Increasing Capacity and Resources. c) Improving Communication and Transparency. d) Flexible Priority Adjustment.

Key Word: Authority, Head Village, Coordinating.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Nagari merupakan suatu pemerintah yang paling kecil dan dalam Pemerintah Nagari para perangkat atau pejabat yang berperan di dalamnya secara langsung berkaitan erat dan bersinggungan dengan masyarakat nagari tersebut. Segala kebutuhan dan keinginan masyarakat dapat diketahui dan dilayani secara langsung oleh

para pejabat atau perangkat nagari tersebut.¹

¹ Muhammad, 2019, *Pengertian Desa Fungsi dan ciri-ciri*, <https://www.banjarsari.labuhanhaji.desa.id/artikel/2019/11/14/desa-pengertian-fungsi-dan-ciri-cirinya>. Diakses tanggal 05 Mei 2022, pukul 21:30.

²Harja Wardoyo, Skripsi: “*Peran Lembaga Nagari dalam Meningkatkan Pembangunan di Nagari Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Padaman Barat*” (Medan: UIN Sumatera Utara, 2018), hlm. 1

Pemerintahan Nagari adalah wujud otonomi daerah, yang merupakan Pemerintahan terendah pengganti Pemerintahan Desa, Pemerintahan Nagari merupakan sebuah sistem yang sangat otonom tumbuh dan berakar di Negeri ini dan telah memberi warna tersendiri terhadap pembentukan karakter watak masyarakat minangkabau².

Pemerintahan Nagari merupakan salah satu bagian yang tidak terpisahkan dari sebuah sistem penyelenggaraan pemerintah daerah. Sebagaimana pelayanan terdepan masyarakat, pemerintah nagari diharapkan dapat menyelenggarakan pemerintah sesuai dengan amanat Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur. Posisi nagari yang berada di garis terdepan dalam struktur hirarki pemerintah di daerah, menyebabkan nagari menjadi institusi yang paling sering mendapat sorotan dari masyarakat. Oleh karenanya, untuk mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat, maka sudah selayaknya pemerintah memikirkan cara-cara pelayanan yang memuaskan masyarakat.³ Kepribadian yang dapat menunjang usahanya mewujudkan hubungan efektif dengan para bawahan atau anggota organisasi. Kepemimpinan memegang peranan penting dalam melaksanakan pembangunan, maka kepemimpinan wali nagari yang profesional sangat dibutuhkan. Wali Nagari ialah sebuah jabatan politik untuk memimpin sebuah nagari di provinsi Sumatera Barat, Indonesia. Seorang pemimpin yang bertanggung jawab atas jalannya organisasi perlu melakukan upaya

yang menjadikan bawahannya bekerja dengan baik sehingga tujuan organisasi dapat tercapai⁴

Namun, dalam pelaksanaan pembangunan partisipatif, tidak jarang ditemukan berbagai kendala yang dapat menghambat proses tersebut. Salah satunya adalah kurangnya koordinasi antara pemangku kepentingan, baik dari pemerintah Nagari, Badan Permusyawaratan Nagari (BPN), maupun masyarakat itu sendiri. Selain itu, faktor lain seperti rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya partisipasi aktif dalam pembangunan, keterbatasan sumber daya manusia, dan adanya hambatan dalam proses pengambilan keputusan bersama juga menjadi tantangan yang perlu dihadapi.

Selanjutnya berdasarkan yang dilakukan oleh Bapak Syafridi B selaku Wali Nagari Sago dalam pembangunan di Nagari Sago sangat berperan penting sesuai masyarakat sekitar untuk ikut dalam musyawarah pembangunan mengakibatkan pembangunan di Nagari Sago sedikit tertunda. Berdasarkan latar belakang di atas penulis melakukan penelitian dengan judul **“WEWENANG WALI NAGARI DALAM MENGKOORDINASIKAN PEMBANGUNAN SECARA PARTISIPATIF DI NAGARI SAGO SALIDO KECAMATAN IV JURAI KABUPATEN PESISIR SELATAN”**

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah tugas dan kewenangan Wali Nagari Sago Salido dalam mengkoordinasikan Pembangunan

³Mohammad Mulyadi, 2019, *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Masyarakat Desa*, Nadi Pustaka, Jakarta, hlm. 125.

⁴Galip lahada, 2018, 'Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Dan Kemasyarakatan Di Desa Malei Lage Kecamatan Lage Kabupaten Poso', *Jurnal Ilmiah Administratie*, Volume: 11 Nomor: 1 Edisi: September 2018, hlm. 1

⁵Luh Mulyani, Luh Deni Sri Wahyuni, Ni Wayan Ayuk Suantari, Nabila Safitri, Kadek Arik Arminiasih, Komang Ariati, 2018, 'Peran kepala Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Tradisional di Desa Julah Kecamatan Tejakula Kabupaten Buleleng-Bali', *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan humanika*, Volume. 8 No. 1, April 2018, hlm. 70.

⁶*Ibid.*

secara partisipatif di Nagari Sago Salido Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan?

2. Apa sajakah kendala-kendala yang dihadapi Wali Nagari Sago Salido dalam mengkoordinasikan Pembangunan secara partisipatif di Nagari Sago Salido Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan?
3. Apa sajakah upaya-upaya yang dilakukan Wali Nagari Sago Salido dalam mengkoordinasikan Pembangunan secara partisipatif di Nagari Sago Salido Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisa tugas dan kewenangan Wali Nagari Sago Salido dalam mengkoordinasikan Pembangunan secara partisipatif di Nagari Sago Salido Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan
2. Untuk menganalisa kendala-kendala yang dihadapi Wali Nagari Sago Salido dalam mengkoordinasikan Pembangunan secara partisipatif di Nagari Sago Salido Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan
3. Untuk menganalisa upaya-upaya yang dilakukan Wali Nagari Sago Salido dalam mengkoordinasikan Pembangunan secara partisipatif di Nagari Sago Salido Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan?

II. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

1. Jenis Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis Sosiologis.
2. Sumber Data yang digunakan adalah Data Primer dan Data Sekunder.
3. Teknik Pengumpulan Data yang digunakan adalah Studi dokumen dan wawancara.
4. Analisa Data. Data yang telah diperoleh kemudian dianalisa secara kualitatif yaitu pengolahan dan penyusunan data menjadi kalimat yang

disusun sedemikian rupa, dan dari hasil wawancara informan.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tugas dan Kewenangan Wali Nagari Sago Salido dalam mengkoordinasikan Pembangunan secara partisipatif di Nagari Sago Salido Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan?

Menurut Wali Nagari Sago Salido, menyatakan bahwa Tugas dan kewenangan wali nagari dalam pengawasan pembangunan di Nagari Sago Salido yaitu

- a. Wali Nagari berperan aktif dalam merancang dan menyusun rencana pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan lokal. Setelah rencana tersebut dikembangkan bersama perangkat nagari dan masyarakat, wali nagari memiliki kewenangan untuk menyetujui rencana tersebut, memastikan kesesuaiannya dengan peraturan yang berlaku serta kebutuhan masyarakat.
- b) Wali Nagari bertanggung jawab untuk memantau pelaksanaan proyek, memastikan bahwa pekerjaan dilakukan sesuai dengan spesifikasi teknis dan jadwal yang telah ditetapkan. Ini termasuk mengawasi kualitas bahan bangunan dan proses pekerjaan, serta mengevaluasi hasil akhir proyek untuk memastikan kesesuaiannya dengan rencana.
- c) Sebagai penghubung antara masyarakat dan pemerintah, wali nagari mengatur komunikasi dan koordinasi antara berbagai pihak terkait. Ini mencakup penyampaian informasi proyek kepada masyarakat, mengadakan rapat koordinasi, serta menjembatani aspirasi dan keluhan masyarakat kepada pihak berwenang.
- d) Wali Nagari juga memiliki kewajiban untuk mengawasi penggunaan anggaran proyek agar

sesuai dengan perencanaan dan mencegah penyimpangan. Pengawasan kualitas pekerjaan dilakukan untuk memastikan bahwa proyek memenuhi standar teknis yang telah ditetapkan.

Tugas dan kewenangan wali nagari dalam pengawasan pembangunan di Nagari Sago Salido sangat penting untuk memastikan bahwa proyek-proyek pembangunan dilakukan dengan transparansi, akuntabilitas, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Wali Nagari menjalankan peran yang luas, mulai dari perencanaan hingga pelaporan, dan memegang kewenangan administratif, pengawasan, komunikasi, kebijakan, dan evaluasi. Peran ini krusial dalam memastikan keberhasilan dan dampak positif dari pembangunan di tingkat nagari.

B. Kendala-Kendala yang di hadapi Wali Nagari dalam Mengkoordinasikan Pembangunan Secara Partisipatif di Nagari Sago Salido, Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan

1. Alih Fungsi Anggaran dari Infrastruktur ke Pertanian dan Kelautan

Salah satu masalah utama adalah pergeseran alokasi dana nagari yang awalnya direncanakan untuk pembangunan infrastruktur fisik, seperti pembangunan WC di rumah warga, ke sektor pertanian dan kelautan.

2. Prioritas Penggunaan Dana Nagari untuk Pemberdayaan Masyarakat

Penggunaan dana nagari yang seharusnya dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur kini lebih difokuskan pada kegiatan pemberdayaan masyarakat, khususnya dalam konteks pemulihan ekonomi pasca-COVID-19. Dana tersebut dialokasikan untuk program-program yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, seperti bantuan untuk

sektor ekonomi yang terdampak pandemi.

3. Sesuai dengan tujuan pembangunan nagari untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat nagari dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, dengan bertujuan pengawasan dana nagari yang transparan.

C. Upaya-Upaya Yang Dilakukan Wali Nagari dalam Mengkoordinasikan Pembangunan Secara Partisipatif di Nagari Sago, Kecamatan IV Jurai Salido Kabupaten Pesisir Selatan

1. Pengelolaan anggaran yang efisien melalui Wali Nagari mengoptimalkan alokasi anggaran dengan merencanakan anggaran yang fleksibel dan dapat disesuaikan berdasarkan prioritas kebutuhan mendesak

2. Peningkatan kapasitas dan sumber daya dengan carta mengupayakan peningkatan kapasitas perangkat nagari dan meningkatkan ketersediaan sumber daya untuk pengawasan. Ini dapat melibatkan pelatihan bagi staf nagari tentang teknik pengawasan dan manajemen proyek serta pengadaan alat dan fasilitas yang diperlukan

3. Meningkatkan komunikasi dan transparansi dengan cara Membangun sistem komunikasi yang lebih baik antara masyarakat, wali nagari, dan pihak-pihak terkait. Mengadakan forum atau pertemuan rutin untuk menginformasikan perkembangan proyek serta menerima masukan dan keluhan dari masyarakat

4. Penyesuaian prioritas yang fleksibel dengan cara menyusun kebijakan yang memungkinkan penyesuaian prioritas pembangunan berdasarkan situasi darurat atau perubahan kondisi ekonomi.

IV. PENUTUP

A. Simpulan

1. Tugas dan Kewenangan Wali Nagari dalam pengawasan pembangunan secara partisipatif di Nagari Sago Salido,

Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan yaitu :

- a) Wali Nagari berperan aktif dalam merancang dan menyusun rencana pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan lokal
- b) Wali Nagari bertanggung jawab untuk memantau pelaksanaan proyek
- c) Mengatur komunikasi dan koordinasi antara berbagai pihak terkait
- d) Mengawasi penggunaan anggaran proyek
- e) Mengembangkan pembangunan nagari

2. Kendala-kendala yang dihadapi Wali Nagari dalam pada pengawasan pembangunan secara partisipatif di Nagari Sago Salido, Kecamatan IV Jurai yaitu:

- a) Pergeseran alokasi dana Nagari dari Infrastruktur ke Pertanian dan Kelautan
- b) Prioritas Penggunaan Dana Nagari untuk Pemberdayaan Masyarakat

Penggunaan dana nagari yang seharusnya dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur kini lebih difokuskan pada kegiatan pemberdayaan masyarakat, khususnya dalam konteks pemulihan ekonomi pasca-COVID-19

3. Upaya - Upaya Wali Nagari dalam mengkoordinasikan pembangunan secara partisipatif di Nagari Sago Salido, Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan yaitu:

- a) Pengelolaan anggaran yang lebih efisien
- b) Peningkatan kapasitas dan sumber daya
- c) Meningkatkan komunikasi dan transparansi
- d) Penyesuaian prioritas yang fleksibel

B. Saran

1. Agar dilakukan pengawasan pembangunan di nagari yang bersifat aktif dalam mengawasi pembangunan, dalam pelaksanaan pembangunan tugas apabila ada kendala yang terjadi sangat berperan

pengawasan langsung terhadap wali nagari.

2. Agar Pemerintahan Nagari Sago berperan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat, pembangunan khususnya dalam pembangunan yang semakin baik untuk masyarakat.
3. Agar dibuatkan skala prioritas dalam penggunaan dana pembangunan Nagari dan dilakukan pengawasan yang lebih optimal dalam penggunaan dana Nagari.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku-buku

- Bagir Manan, 1997, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*, Cetakan ke 2, Pt.alumni, Jakarta.
- Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta. Lukman Ali, ed., 1993, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka Jakarta.
- Muhamad Mu'iz Raharjo, S.STP., M.SI., 2020, *Pengelolaan Dana Desa*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Mohammad Mulyadi, 2019, *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Masyarakat Desa*, Nadi Pustaka, Jakarta, hlm. 125.
- Philipus M. Hadjon, 1987 *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat*, Bina Ilmu, Surabaya.
- Ronny Hanitiyo Soemitro, 1985, *Studi Hukum dan Masyarakat*, Alumni, Bandung.
- Suratman dan Philips Dillah, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung.
- Silalah, 2023, *Kepemimpinan Pemerintah Desa dan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa*. uwais inspirasi indonesia.
- Zainudidin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta. Zainudin Ali, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

2. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari.

3. Sumber lainnya

Dody Eko Wijayanto, 2014, Kepala Desa dengan Badan Permasyarakatan Desa dalam Pembentukan Peraturan Desa, *Jurnal Independent*, Volume 2, Nomor 1, 2014.

Fajar, 2017, *Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Nagari di Sumatera Barat: Perspektif Pembangunan Berkelanjutan*. *Jurnal Pembangunan Sosial*, 5(3).

Galip lahada, 2018, 'Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Dan Kemasyarakatan Di Desa Malei Lage Kecamatan Lage Kabupaten Poso', *Jurnal Ilmiah Administratie*, Volume : 11 Nomor : 1 Edisi : September 2018.

Harja Wardoyo. 2018. "Peran Lembaga Nagari dalam Meningkatkan Pembangunan di Nagari Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat". Skripsi. Medan: UIN Sumatera Utara

Heri Saputra, Syawaludin, Jamaludin, Udin Saprudin, Tarwijo, 2021, Manajemen Pemerintahan Desa dalam Mencapai Keunggulan Potensial dan Berdaya Saing, *Jurnal Lokabmas*, Volume 02, Nomor 01 Maret 2021, hlm 10. <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/senan/article/view/8278>.

Diakses tanggal 04 Mei 2022, pukul 21.35

Hasanah, 2016, *Wali Nagari dan Proses Pengambilan Keputusan dalam Pembangunan Desa di Sumatera Barat*, *Jurnal Hukum Administrasi Negara*, 8(1).

Luh Mulyani, Luh Deni Sri Wahyuni, Ni Wayan Ayuk Suantari, Nabila Safitri, Kadek Arik Arminiasih, Komang Ariati, 2018,

Muhammad, 2019, *Pengertian Desa Fungsi dan Ciri-Ciri*. <https://www.banjarsari-labuhanhaji.desa.id/artikel/2019/11/14/desa-pengertian-fungsi-dan-ciri-cirinya>. Diakses tanggal 05 Mei 2022, pukul 21:30

Mulyana, 2017, *Wewenang dan Tanggung Jawab Wali Nagari dalam Pembangunan Desa: Perspektif Hukum dan Partisipasi Masyarakat*. *Jurnal Hukum dan Pemerintahan*, 12(2).

Nanang Zulkarnaen, 2018, *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Volume 6, Nomor 01, Maret 2018.

Nofriansyah, 2018, *Model Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Nagari di Sumatera Barat*, *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 7(1).

Peran kepala Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Tradisional di Desa Julah Kecamatan Tejakula Kabupaten Buleleng- Bali', *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan humanika*, Volume. 8 Nomor 1, April 2018.

Rahman, Syaiful, 2018, *Peranan Kepala Desa Dalam Melaksanakan Pembangunan Desa di Desa Delik Kecamatan Pahlawan Kabupaten Pahlawan*, Universitas Islam Riau. <https://repository.uir.ac.id/4028/>

Selni Paru, Markus Kaunan, Ismail Sumanpous, 2019, *Peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan dan Pembangunan di Desa Salibabu*, *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintah*, Volume 2, Nomor 2

Semaun, Felix, 2019, *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Jurnal Pekan, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, Kalimantan, Jilid 4, Terbitan 1

Trisnani, 2017, Peran KIM Daerah Tertinggal dalam *Memanager Informasi untuk Meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan Masyarakat Sekitar*; Peneliti Balai Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika (BPPKI) Surabaya, Volume 6, Nomor 1.
<https://jurnal.kominfo.go.id>

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih kepada Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H.,M.H sebagai Dosen Pembimbing penulis yang sudah memberikan waktu dan arahnya dalam menyelesaikan skripsi dengan baik juga kepada para pihak yaitu:

1. Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati R.,S.H.,M.H.
2. Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Bapak Hendriko Arizal, S.H.,M.H.
3. Ketua Bagian HTN, Bapak Helmi Chandra SY, S.H., M.H
4. Kepada para pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.